

PENGINTEGRASIAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* KEDALAM SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT

Oleh:
SYARIF ABDURRAKHIM
NIM. E21112102

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura, 2015. Email : syarifjimmy@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul Pengintegrasian *Electronic Government* ke Dalam Sistem Informasi Rumah Sakit. Penulisan artikel ini di maksudkan untuk mengetahui Proses Implementasi Kebijakan *Electronic Government* ke Dalam Sistem Informasi Rumah Sakit.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya Pengintegrasian *Elevtronic Government* ke Dalam Sistem Informasi Rumah Sakit melalui beberapa pentahapan. Pentahapan tersebut antara lain : tahap yang pertama, tahap interpretasi, yaitu sosialisasi agar setiap ruangan dan instalasi di lingkungan rumah sakit umum daerah dokter soedarso Pontianak dapat memberikan sistem informasi yang baik dan dapat mengumpulkan data sesuai permintaan dari bagian pengolahan data, tahap yang kedua yaitu tahap pengorganisasian, belum adanya pejabat yang membawahi Tehnologi Informasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur atau SOP pada ruang perawatan dan instalasi, sumber daya manusia yang berkompeten, dukungan sumber daya keuangan, infrastruktur atau peralatan yang memadai, penetapan manajemen pelaksana kebijakan dengan berkoordinasi dengan petugas pengelola data masing masing ruangan dan instalasi, dan penetapan jadwal kegiatan berdasarkan time schedul serta belum adanya sosialisasi program *electronic government* melalui penyelenggaraan sistem informasi di rumah sakit. Tahap yang ketiga yaitu tahap aplikasi, dalam tahap aplikasi proses implementasi kebijakan *electrnic government* cukup efektif dan efisien meskipun ada beberapa kendala seperti belum adanya perangkat lunak, hosting serta penganggaran, sehingga penggunaan elektronik pada sistem informasi pada rumah sakit untuk ruang perawatan dan instalasi belum dapat dilakukan.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Electronic Government, Interpretasi, Pengorganisasian, Aplikasi.

ABSTRACT

This article titled Integrating Electronic Government to Information System In Hospital. The writing of this article are intended to determine the Policy Implementation Process Electronic Government to Information System In Hospital.

Conclusion The results showed that not maximal integration of Electronic Government to Information System In Hospital through several stages. The phasing among others: the first stage, the stage of interpretation, namely that every treatment room socialization and installations in the general hospital doctor Soedarso Pontianak can provide information that good and system can collect data on demand from the data processing section, the second stage is organizing, the absence of officials in charge of Information Technology, the lack of standard operating procedures or SOPs in the treatment room and installation, competent human resources, financial resources support, infrastructure or adequate equipment, the determination of executive management policies in coordination with each data manager treatment room and installation, and the determination of the schedule of activities based on time schedul and the lack of socialization of electronic government programs through the implementation of information systems in hospitals. The third stage of the application, the application of electronic government policy implementation process is quite effective and efficient although there are some constraints such as the lack of software, posting and budgeting, so that the use of electronic so the use of electronic government in the hospital information system for maintenance and installation space can not be done.

Keywords: Implementation, Elektronik Government, Interpretation, Organizing, Applications.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap pekerjaan dan kegiatan memerlukan data dan informasi, dengan adanya data dan informasi maka manajemen dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan data dan informasi yang didapat, sehingga letak keberhasilan manajemen tergantung pada dukungan tersedianya data dan informasi yang valid sehingga manajemen dapat mengolah data yang diperoleh dengan tepat sehingga dapat membuat keputusan tepat dan benar. Dengan demikian data dan informasi sangatlah penting bagi suatu manajemen organisasi dalam kemajuan organisasi dan kemampuan melayani masyarakat sesuai dengan data dan informasi yang didapat. Oleh karena itu, tujuan tersebut dapat dicapai secara maksimal, efektif dan efisien apabila manajemen mendapat dukungan yang tepat. Manajemen yang tepat hanya dapat bekerja dengan baik dan benar apabila mendapatkan dukungan data dan informasi yang benar.

Berbagai aplikasi diciptakan dalam mewujudkan system kerja yang efektif, efisien, transparat dan akuntabel. Kebutuhan untuk meningkatkan proses kerja yang cepat, tepat dan akurat menuntut pemerintah untuk secepatnya dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangannya dikenal sebagai *electronic government*.

Electronic Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Dengan meningkatnya kompetisi suatu organisasi dirasakan kurang efektif jika dilakukan secara manual. Untuk menghasilkan informasi yang benar benar diperlukan secara cepat sistem pengelolaan informasi secara komputerisasi.

Dewasa ini penggunaan informasi, komunikasi dan teknologi (*Information, Communication and Technology* atau ICT) telah berkembang luas. Disamping itu, berdasarkan inpres No. 3 Tahun 2003 seperti yang sudah disebutkan tujuan penerapan *electronic government* secara garis besar adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dimana dengan penggunaa teknologi akan dapat memberikan fasilitas pengolahan informasi menjadi lebih cepat dibandingkan secara manual, selain itu dengan pengolahan sistem informasi secara komputerisasi dapat meningkatkan efisiensi, pengendalian operasi yang lebih ketat, biaya yang lebih rendah, meminimalisir kesalahan dan meningkatkan perencanaan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan (Saputra, 2008 : 4)

Konsep *electronic government* berkembang karena adanya tiga pemicu utama yaitu perkembangan era globalisasi yang cepat, kemajuan teknologi dan informasi serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu aspek kehidupan manusia yang tergantung

terhadap informasi adalah bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui rumah sakit. Agar pembangunan kesehatan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan peningkatan dan pemanfaatan manajemen kesehatan melalui manajemen rumah sakit. Sebuah rumah sakit memiliki fungsi utama untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang sempurna kepada pasien baik pasien rawat inap, pasien rawat jalan, maupun pasien gawat darurat. Pemerintah dalam hal ini departemen kesehatan, melalui rumah sakit, bertanggung jawab akan mutu pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada semua pasien. Pemerintah mendelegasikan tanggung jawabnya kepada staf dirumah sakit.

Berdasarkan orientasi lapangan penulis, masih ditemukannya keluhan masyarakat dalam hal pelayanan yang mereka dapatkan, misalnya dalam kecepatan pelayanan dirumah sakit. Hal ini tentunya berkaitan dengan belum terlatihnya para staf administrasi dalam mengoperasikan jaringan dan belum tersedianya jaringan internet pada setiap ruangan dirumah sakit. Rumitnya dan lamanya proses pengurusan untuk mendapatkan pelayanan membuat pasien menjadi tidak sabar, ini disebabkan rumah sakit setiap harinya melayani ratusan hingga ribuan pasien rawat jalan yang dimana rumah sakit soedarso adalah rumah sakit rujukan dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Ini yang menyebabkan pelayanan menjadi kurang efektif dan

efisien karena pasien maupun keluarga yang mengurus administrasi harus bolak balik untuk mendapatkan persetujuan maupun pelayanan kesehatan.

Rumah sakit sebagai suatu lembaga organisasi juga memiliki *record* sebagai bahan pelaksana kegiatan administasi pelayannya. Sebagai suatu lembaga yang melayani kesehatan masyarakat, suatu rumah sakit akan menghasilkan *record* yang disebut dengan rekam medis pasien.

Didalam rekam medis berisi informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengobatan dan perawatan pasien yakni tentang penyakit, perawatan dan penanganan medis terhadap pasien.

Informasi yang tersedia di rekam medis digunakan oleh staf bagian administrasi untuk dilakukan dokumentasi dan menghitung jumlah pasien yang dioperasi setiap harinya dalam satu bulan yang dimana memiliki permasalahan tersendiri salah satu contoh kasus di bagian Instalasi Bedah Sentral (IBS) di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso terutama masalah pembatalan jadwal operasi yang sudah ditentukan sebelumnya

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Harbani Pasolong (2012;75) Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendiskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat,

menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan *Electronic Government* Dalam Menunjang Sistem Informasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak.

Dalam melakukan penelitian, penulis berusaha mengenal para nara sumber agar mendapat data dan informasi yang akurat. Definisi nara sumber menurut Moeleong (2007 : 11) adalah orang yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi tentang informasi terhadap masalah yang diteliti.

Subjek penelitian merupakan nara sumber, agar dapat memperoleh data dan gambaran yang konkrit, lengkap, dan objektif tentang masalah yang diteliti serta sesuai dengan menggunakan purposive yaitu:

1. Wakil Direktur II Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak
2. Kepala Seksi Pusat Data Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak
3. Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral
4. Dua orang staf administrasi Instalasi Bedah Sentral
5. Orang tua atau keluarga pasien yang melakukan pendaftaran administrasi di ruangan Instalasi Bedah Sentral. Pemilihan informan dilakukan secara acak sampai tercapainya data yang diperlukan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2004:166), yaitu tehnik yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data dengan mengadakan pengamatan terhadap masalah yang diteliti yaitu dengan secara langsung ke lokasi penelitian dengan melihat dari dekat kenyataan yang ada di bagian ruang Instalasi Bedah Sentral dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian data beserta permasalahan yang dihadapi.
- b. Wawancara yaitu Tanya jawab langsung kepada informan dan nara sumber yang mengetahui cara pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data. Tehnik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan sejumlah pertanyaan secara lisan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Tehnik Dokumentasi, yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal peristiwa yang sudah berlalu seperti catatan harian, biografi, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

Menurut Jones (dalam Joko Widodo, 2006:89-94) proses implementasi suatu kebijakan publik mencakup tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi.

1. Tahap Interpretasi , yaitu usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentukan kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan . Dimensi interpretasi ini hamper sama dengan yang dikemukakan oleh Edward III dalam dimensi komunikasi. Jones mengutip pendapat Edward III sebagai berikut :
“The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do...if policies are to be implemented properly, implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not, implementers will be confused about what they should do, and they will have discretion to impose their own views on the implementation of policies, view that may be different from those of their superiors”. (Syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan Jika kebijakan harus diterapkan dengan benar , arahan pelaksanaan tidak hanya harus diterima , tetapi mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak , pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan memiliki keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka

sendiri tentang pelaksanaan kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dari atasan mereka (dalam Jones, 1984:178).

Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.

Tahap interpretasi juga merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional. (dalam Joko Widodo,2006:90).

Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (walikota atau bupati) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsure pelaksana teknis pemerintahan daerah.

Interpretasi kebijakan tersebut tidak sekedar

menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah kebijakan tersebut. Kebijakan perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan sehingga akan dapat menerima, mendukung pelaksanaan kebijakan yang ada.

2. Tahap Pengorganisasian, merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*sources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada sumber daya untuk mewujudkan dan merealisasikan kebijakan yang menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

Adapun variable dalam tahap pengorganisasian yaitu :

a. Pelaksanaan kebijakan (*Policy implementor*), pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti : Dinas, Badan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan pemerintah daerah, sector swasta, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan komponen masyarakat.

b. Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedur), setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standard oprating procedur (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan refrensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Sumber Daya Keuangan, Peralatan dan Manusia, besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan baik itu yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Demikian juga dengan peralatan dan sumber daya manusia yang cukup dan memadai sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan, manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini ditekankan pada pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan. Apabila ditunjuk

salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi Koordinator biasanya lembaga yang terkaiterat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai coordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

- e. Penetapan Jadwal Kegiatan, agar pelaksanaan kebijakan menjadi baik dalam proses pelaksanaan kebijakan maka perlu ada jadwal kebijakan. Jadwal kebijakan tersebut harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan.

3. Tahap Aplikasi, merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan.

Jones (1984:180) menyatakan bahwa *Applications simply refers to doing the job. It includes "providing goods and services" as well as other programmatic objectives (for examples, regulation and defense)*. Aplikasi hanya mengacu pada melakukan pekerjaan. Ini termasuk "menyediakan barang dan jasa" serta tujuan program lainnya (sebagai contoh, regulasi dan pertahanan).

Application is often a dynamic process in which the implementor are enforcer is guided generally by program

directives or standards and specifically by actual circumstances. Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang actual. (Jones, 1984:180)

Selanjutnya, dalam melaksanakan kebijakan, para pelaksana diarahkan oleh pedoman-pedoman program maupun patokan-patokannya. Selain itu pelaksanaan pun bersifat dinamis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jones :

Suatu penafsiran politis dari yang berwenang mungkin tidak akan dapat dipraktekkan di lapangan, dan sebaliknya penerapan sering kali merupakan suatu proses dinamis di mana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya. (Jones, 1991:325)

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek afektifitas, efisiensi, dan objektifitas. Mengenai hal ini, Jones mengemukakan :

Aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu

peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif. (Jones, 1991:328)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka aplikasi kebijakan publik ini merupakan upaya yang menekankan *the establishment of policy goals*, agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (*to be effectively and efficiently*) dalam pengelolaan data secara elektronik pada bagian Instalasi Bedah Sentral RSUD Dokter Soedarso Pontianak.

D. Pembahasan

Penggunaan informasi, teknologi dan komunikasi dalam satu instansi public bertujuan agar terwujudnya efektifitas, efisiensi atau meningkatnya kinerja instansi secara keseluruhan. Tehnologi informasi menunjang untuk melakukan pengolahan data, terutama data yang bersifat interaktif, rutin dan dapat diotomasikan dengan menggunakan perangkat komputer. Dalam interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta dan pemerintah dengan masyarakat sebagai

pengguna layanan tehnologi informasi juga akan mengurangi biaya administrasi dan interaksi dalam pelayanan publik sehari-hari.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, pada prinsipnya bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *electronic government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan tehnologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktifitas yang berkaitan yaitu :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
2. Pemanfaatan kemajuan tehnologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah Negara.

Sebuah sistem informasi rumah sakit idealnya mencakup integrasi fungsi-fungsi klinikal (medis), keuangan, serta manajemen yang nantinya merupakan sub sistem dari sebuah sistem informasi rumah sakit. Sub sistem ini merupakan unsur dari sistem informasi rumah sakit yang tugasnya menyiapkan informasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada untuk menyederhanakan pelayanan

pada suatu rumah sakit. Selain itu juga rekam medis merupakan inti dari sistem data klinis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan dan melacak kembali data yang diperlukan dalam penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Untuk menganalisis tentang proses implementasi kebijakan *electronic government* dalam menunjang system informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak penulis menggunakan proses implementasi suatu kebijakan publik yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi.

1. Tahap Interpretasi

Tahap Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional.

Dengan adanya kebijakan penggunaan elektronik dalam menunjang sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak dapat meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat .

Berdasarkan informasi dari informan yaitu Wakil Direktur II Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso, kebijakan strategis, kebijakan manajerial dan kebijakan teknis

operasional dalam melakukan program *electronic government* pada Seksi Pengolahan Data Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso mengatakan :

“ Bahwa kebijakan umum ataupun strategis pada proses implementasi elektronik pada Bagian Pengolahan Data Elektronik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak yaitu tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 /Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Nomor :YM.00.03.2.2 1996 tentang Revisi Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit”. Selain itu juga ditambah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Electronic Government.

Dengan pengoptimalan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik maka data-data pada setiap ruangan dan instalasi di rumah sakit akan dapat ditampilkan oleh Bagian Pengolahan Data Rumah sakit (Rekam Medik). Interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan atau sosialisasi kebijakan program *electronic government* ini agar seluruh bagian (ruangan) dan instalasi dapat mengetahui dan memahami apa yang

menjadi arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Selanjutnya masih informasi dari informan yaitu Kepala Seksi Pusat Data, mengatakan :

“ Belum adanya sosialisasi ke ruangan dan instalasi tentang program electronic government dan memang belum adanya jaringan internet yang bisa diakses langsung oleh bagian rekam medik rumah sakit sebagai mana tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government.”

Tanpa adanya dukungan dari Pemerintah khususnya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat maka pembangunan dan pengembangan *electronic government* tentu akan sulit berjalan. Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak sudah bagus dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Bentuk dari kebijakan teknis operasional, yaitu Kepala Rungan Instalasi Bedah Sentral, dalam pekerjaan pengelolaan data elektronik pada Instalasi Bedah Sentral mengatakan :

“Setahu saya belum ada kebijakan dan pada ruangan dan instalasi rumah sakit tentang penggunaan

data elektronik dalam pelaporan data dan selama ini pelaporan masih dilakukan secara manual dan bila ada data yang diminta oleh bagian pengelolaan data rumah sakit maka ada petugas pengelolaan data yang datang meminta data yang di inginkan “.

Hal yang sama di ungkapkan oleh Bagian Administrasi Instalasi Bedah Sentral mengatakan :

“bahwa selama ini pelaporan data pasien yang dilakukan tindakan medis operasi di lakukan setiap bulan secara manual, walaupun di instalasi sudah ada komputer namun belum tersambung dengan jaringan internet langsung ke bagian pengelolaan data rumah sakit”.

Selain itu juga hal yang sama berdasarkan informasi dari informan pasien dan keluarga pasien tentang proses administrasi mengatakan :

“Belum mengerti proses pengurusan administrasi sebelum dilakukan tindakan medik operasi dan terkadang pasien maupun keluarga lupa membawa persyaratan yang diperlukan “.

Berdasarkan hal tersebut supaya arah dan kebijakan dari program *electronic government* , maka Bagian Pengolahan Data Rumah Sakit harus mensosialisasikan tujuan yang ingin dicapai kepada setiap ruangan dan instalasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak.

2. Tahap Pengorganisasian

Organisasi dalam hal ini merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang. Pada tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan, standar prosedur operasi, sumber daya, penetapan manajemen pelaksana kebijakan dan penetapan jadwal kegiatan. Adapun tahap-tahap dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana Kebijakan (Policy Implementor)

Sejalan dengan implementasi *Electronic Government* di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak maka ditunjuklah Kepala Pusat Data Rekam Medik sebagai leading sector atau sebagai pelaksana kebijakan untuk melakukan pengelolaan data secara elektronik.

Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pusat Data Rekam Medik mengatakan :

“ Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Nomor :YM.00.03.2.2.1996 tentang Revisi Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit , Pokok dan Fungsi Bagian Pengolahan Data salah satu diantaranya adalah

melakukan pengolahan data rekam medik di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak “.

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah jelas bahwa pelaksanaan program *electronic government* melalui penyelenggaraan sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak adalah bagian pusat data rekam medik rumah sakit.

Selain itu juga pengorganisasian juga harus di tentukan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan kebijakan program *electronic government*. Masih berdasarkan informasi yaitu Kepala Seksi Pusat Data Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak mengatakan :

“ Bahwa organisasi yang kita libatkan di sini adalah seluruh Satuan Kerja, ruangan dan instalasi yang ada di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak , sehingga data-data yang terhimpun adalah data-data yang up to date”.

Jadi lembaga organisasi yang melaksanakan kebijakan program *electronic government* di rumah sakit adalah Seksi Pusat Data Rekam Medik .

Dari beberapa hal mengenai pelaksanaan kebijakan , dapat disimpulkan bahwa Seksi Pusat Data Rekam Medik Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak telah menjalankan fungsinya sebgai

leading sector untuk melakukan pengelolaan data secara elektronik. Selain itu dalam penetapan lembaga yang terlibat dalam proses implementasi program *electronic government* hanya ruang lingkup Satuan Kerja, Ruang Dan Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak.

2. Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Prosedure (SOP)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standar operasional prosedur (SOP). SOP merupakan sebuah dokumen tertulis yang berisi langkah-langkah pelaksanaan yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan berdasarkan tugas dan fungsinya dengan bertujuan meningkatkan penerapan prosedur kerja lebih sistemik dan teratur serta meningkatkan kejelasan tanggung jawab terhadap setiap langkah pelaksanaan. dalam pelaksanaan pada Seksi Pusat Data Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak sudah memiliki SOP dalam melakukan pengolahan data elektroniknya kecuali untuk Ruang Dan Instalasi.

Berdasarkan informasi dari informan yaitu Kepala Ruang Instalasi Bedah Sentral mengatakan :

“ bahwa setahu saya belum ada kebijakan dan SOP pada ruangan dan instalasi rumah sakit tentang penggunaan data elektronik dalam pelaporan data ”.

Berdasarkan hal tersebut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) memang diperlukan dalam setiap satuan kerja, ruangan dan instalasi ini

dikarenakan bentuk dari pertanggung jawaban tugas yang diberikan kepada staf administrasi dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan supaya hasil yang di dapat sempurna dan optimal.

Hal senada juga di katakana Bagian Administrasi Instalasi Bedah Sentral :

“ kita di sini belum adanya SOP pada pada pengolahan data elektronik , diharapkan untuk kedepannya pihak pimpinan dapat membuat SOP tersebut untuk mempermudah dalam bekerja. ”

Dari beberapa hal mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan data elektronik pada ruangan dan instalasi dapat disimpulkan belum adanya SOP dalam suatu pekerjaan sehingga di khawatirkan data-data yang di dapatkan tidak dapat di dimanfaatkan secara maksimal oleh Seksi Pusat Data.

3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya dalam proses implementasi *electronic government* melalui penyelenggaraan system informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak meliputi sumber daya manusia, keuangan dan peralatan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan factor yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program *electronic government*.

Tabel 4.1
jumlah Tenaga Kerja RSUD Dr
Soedarso

No.	Jenis Tenaga	Jumlah
1.	Dokte spesialis	47
2.	Dokter umum	22
3.	Dokter gigi	6
4.	Dokter konsultan	6
5.	Tenaga keperawatan	359
6.	Tenaga kebidanan	46
7.	kefarmasian	35
8.	Kesehatan masyarakat	38
9.	Gizi	29
10.	Keterampilan fisik	13
11.	Keteknisian medis	58
12.	Tenaga non kesehatan	254
.	Total	913

Berdasarkan informasi dari informan yaitu Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral mengatakan :

“ Pegawai administrasi yang ada di instalasi bedah sentral belatar belakang pendidikan SLTA dan mendapatkan pelatihan pekarya administrasi kesehatan selama 1 (satu) tahun“.

Hal ini menunjukkan bahwa aparatur yang ada pada bagian administrasi instalasi bedah sentral

belum memadai untuk melakukan pengelolaan data elektronik pada Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak.

b. Sumber Daya Keuangan

Pengalokasian anggaran untuk proses implementasi program *electronic government* dalam menunjang sistem informasi pada Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dari beberapa hal mengenai sumber daya keuangan, dapat disimpulkan bahwa belum adanya anggaran untuk mendukung terhadap upaya program *electronic government* untuk ruangan dan instalasi terlihat dari belum adanya rencana pemasangan jaringan internet yang terkoneksi langsung dengan seksi data rekam medik maupun antar ruangan dan instalasi di rumah sakit.

4. Peralatan atau Infrastruktur

Adapun peralatan dan infrastruktur tehnologi yang telah di persiapkan oleh Seksi Pusat Data Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak. Sementara ini pengelolaan data elektronik hanya bisa dilakukan untuk bagian tertentu saja seperti bagian rekam medik, bagian rawat jalan , bagian pendafran, bagian penjamin kesehatan dalam hal ini BPJS Kesehatan, serta bagian administrasi rumah sakit, sedangkan untuk ruangan perawatan dan instalasi

belum terpasang walaupun sudah ada servernya.

Dari beberapa hal peralatan, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur atau peralatan sangat di butuhkan supaya program *electronic government* dapat berjalan dengan lancar dengan dianggarkannya nanti sebaiknya pembelian peralatan-peralatan tersebut benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

5. Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan

Manajemen pelaksana kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila di tujuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Awal dari perencanaan program *electronic government* pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak merupakan tindak lanjut visi, misi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak. *Electronic government* sebagai konsep pembangunan teknologi informasi dan mentransfer informasi data elektronik penyelenggaraan aktifitas pelayanan rumah sakit dan ini tidak akan terwujud tanpa adanya koordinasi dari seluruh bagian di rumah sakit. Berdasarkan informasi dari informan

Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral mengatakan :

“ *Koordinasi yang dilakukan oleh Seksi Pusat Data Rekam Medik dengan bagian administrasi instalasi bedah sentral sudah berjalan dengan baik walaupun belum adanya jaringan internet yang terhubung langsung dengan pusat data*”.

Jadi dengan adanya koordinasi dengan petugas pengelola data pada masing-masing ruangan dan instalasi untuk menjaga kualitas dari data supaya akurat untuk diserahkan kepada Seksi Pusat Data Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak.

6. Penetapan Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu , setiap pelaksanaan kebijakan perlu disusun jadwal pelaksanaan kebijakan . Fungsi *time schedule* supaya kegiatan yang dilaksanakan atau direncanakan pada tahun tersebut memuat gambaran kapan dimulai dan kapan diakhiri kegiatannya.

Jadi dengan adanya penetapan jadwal kegiatan dengan menggunakan *time schedule* maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang sudah di tetapkan sebelumnya.

3. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dalam pengaplikasian *electronic government* sebagai *leading sector* adalah Bagian Pengolahan Data Elektronik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak belum berjalan secara optimal.

Selain itu juga dalam tahap aplikasi ini, ada beberapa ruangan dan instalasi yang rutin ataupun yang tidak mengumpulkan data pada Bagian Pengolahan Data (Rekam Medik) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak. Terkadang meskipun sudah ada petugas administrasi dalam mengelola data di ruangan dan instalasi yang sudah ditunjuk, terkadang bagian pengelolaan data harus turun sendiri untuk mengambil datanya.

Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pusat Data Rekam Medik mengatakan :

“ Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Nomor :YM.00.03.2.2.1996 tentang Revisi Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit , Pokok dan Fungsi Bagian Pengolahan Data salah satu diantaranya adalah melakukan pengolahan data rekam medik di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak “.

Berdasarkan informasi dari informan Bagian Administrasi Instalasi Bedah Sentral mengatakan :

“ Dalam proses penginputan data pasien dapat dilakukan setiap hari dan untuk pelaporan dilakukan sebulan sekali biasanya setiap tanggal 5 setiap bulan dan laporan biasanya diantar sendiri ke bagian pusat data rumah sakit atau kadang-kadang petugas pusat data yang meminta data di instalasi bedah sentral “.

Masih berdasarkan informasi yaitu Kepala Seksi Pusat Data Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak mengatakan :

“ Bahwa organisasi yang kita libatkan di sini adalah seluruh Satuan Kerja, ruangan dan instalasi yang ada di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak , sehingga data-data yang terhimpun adalah data-data yang up to date”

Terkadang meskipun sudah ada petugas pengelola data yang telah ditunjuk masih ada saja beberapa ruangan dan instalasi belum mengumpulkan datanya, sehingga pihak seksi pusat data harus turun sendiri untuk mengambil data.

Berdasarkan informasi dari informan yaitu Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral mengatakan :

“ Pegawai administrasi yang ada di instalasi bedah sentral belatar belakang pendidikan SLTA dan mendapatkan pelatihan pekarya administrasi kesehatan selama 1 (satu) tahun“

Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak baru memiliki sistem online untuk bagian tertentu saja seperti bagian rekam medik, bagian pendaftaran, bagian penjamin pelayanan kesehatan dalam hal ini BPJS Kesehatan serta bagian Administrasi saja sedangkan untuk bagian ruangan dan instalasi belum terpasang, sehingga informasi dan data tidak dapat di akses oleh bagian pengelolaan data rumah sakit dan masih melakukan jemput bola untuk mendapatkan data yang di perlukan.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh pasien maupun keluarga pasien tentang prosedur pelayanan pada Instalasi Bedah Sentral mengatakan :

“ Bahwa prosedur pelayanan pasien yang akan dilakukan tindakan medik operasi terlalu berbelit-belit, ini dikarenakan prosedur yang di haruskan untuk dilakukan tindakan medik cukup banyak seperti mengambil kartu merah di bagian pendaftaran, penjadwan operasi , mendapatkan kartu jadwal tindakan operasi, mencari ruangan perawatan hingga mengurus administrasi lain

sebelum dilakukan tindakan medik”.

Dari beberapa hal mengenai tahap aplikasi dalam proses implementasi kebijakan *electronic government* dalam menunjang system informasi pada rumah sakit umum daerah Dokter Soedarso Pontianak maka dapat disimpulkan bahwa , tahap aplikasi cukup efektif dan efisien meskipun pada ruangan dan instalasi belum mempunyai server dan jaringan online ke Bagian Pengelolaan Data (Rekam Medik), hanya saja dengan tidak adanya jaringan online yang terhubung maka untuk publikasi data dan *update* data.

Selain itu juga dalam tahap aplikasi ini jika ada rungan perawatan dan instalasi yang belum mengumpulkan data atau menyerahkan data maka bagian pengelolaan data akan turun sendiri ke ruangan dan instalasi untuk meminta dan mengambil datanya sehingga memerlukan waktu lagi untuk menghimpun data.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada proses Implementasi Kebijakan *Electronic Government* Dalam Menunjang Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak sebagai berikut :

1. Tahap Intepretasi, pada Kebijakan strategis ini memuat Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak

dalam pengembangan *electronic government* supaya dalam kebijakan program *electronic government* dapat berjalan maka harus mengkomunikasikan kepada seluruh bagian pada instalasi di rumah sakit supaya arah dan kebijakan dari program tersebut jelas. Bentuk dari pengkomukasian tersebut yaitu Bagian Pengolahan Data Elektronik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak telah melakukan sosialisasi melalui forum sosialisasi pemanfaatan data berbasis internet.

Saran : Melakukan koordinasi dengan petugas pengelola data masing-masing ruangan perawatan dan instalasi dan mengingatkan kepada petugas tersebut supaya tidak lupa untuk menyerahkan data ruang perawatan dan instalasi secara berkala setiap hari mengingat kesibukan masing-masing petugas administrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak.

2. Tahap Pengorganisasian dalam proses Implementasi Program *Electronic Government* penyelenggaraan dalam menunjang sistem informasi rumah sakit adalah pelaksana kebijakan, standar prosedur operasi (*Standar operating procedures*), sumber daya keuangan, manusia dan

peralatan, penetapan manajemen pelaksana kebijakan, dan penetapan jadwal kegiatan.

Saran : Membuat Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan *electronic government* dalam sistem informasi rumah sakit.

3. Tahap Aplikasi, penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam hal ini Implementasi Kebijakan *electronic government* pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak sudah efektif dan efisien meskipun ada beberapa hal yang menjadi kendala yaitu belum adanya jabatan pada bagian informasi dan perangkat lunak yang selama ini bagian tersebut masih di bawah seksi pusat data. Selain itu jika ada ruangan dan instalasi yang belum mengumpulkan data maka staf pusat data (rekam medik) akan turun ke ruangan dan instalasi untuk mengambil datanya.

Saran : Direktur Rumah Sakit dan Wakil Direktur Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak, agar dengan segera dapat mengisi pejabat pada jabatan Tehnologi Informasi.

REFERENSI

Jones, Charles O.1991.Pengantar
Kebijakan Publik Cet
1.Jakarta:Rajawali.

Pasalong,Harbani.2012.*Metode
Penelitian Administrasi Publik.*
Bandung:Alfabeta

Saputra, Anggi Septian. 2008.
*Efektifitas Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Pada
Direktorat Badan Pengkajian
dan Pengembangan Kebijakan
Departemen Luar Negeri .* UI:
Jakarta.

Widodo, Joko.2007. *Analisis
Kebijakan Publik : Konsep dan
Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik.* Malang: Bayu
Medika.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A.Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SYARIF ABDURRAHIM
NIM / Periode lulus : E2112102
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/HP : SYARIFJIMNY@gmail.com / 089634379679

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PENGINTEGRASIAN ELECTRONIC GOVERNMENT
KEDALAM SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/dijetujui
Pengelola Jurnal

NIP. _____

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 10 APRIL 2015

(SYARIF ABDURRAHIM)
nama terang dan tanda tangan mhs

cetakan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).